




Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK Datangi Sanggau Wabup: Rasanya Mau Demam

SANGGAU-RK. Tim koordinasi supervisi dan pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Kalimantan Barat pada Rabu (18/7) pagi mendarangi Kabupaten Sanggau. Kedatangan tim yang dipimpin Tri Budi Rochmanto itu sempat menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah yang dipimpin langsung Bupati Paolus Hadi didampingi Wabup Yohanes Ontot. Dalam pertemuan yang berlangsung bagaimana mewujudkan percepatan pemberantasan korupsi yang terintegrasi di Kabupaten Sanggau.

Kepada wartawan, Tri menyampaikan kedinginan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian rencana aksi pencegahan korupsi dan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Sanggau.

Ia menyebut ada delapan fokus area yang dimonitor dan dievaluasi, yaitu: perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola dana

desa, manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah.

"Untuk Kabupaten Sanggau capaian semester satu capaiannya 59 persen menempati urutan ke dua setelah Singkawang. Jadi delapan fokus area ini ada sekitar 48 indikator yang harus terpenuhi. Jadi Sanggau untuk sementara di angka 59 persen," ungkap Tri.

Pemkab Sanggau diminta untuk terus meningkatkan, sefektifnya mencapai 75 persen. "Karena ada beberapa indikator yang rada sulit untuk dipenuhi karena jangka panjang," akunya.

Contohnya, kapabilitas APIP terkait pemenuhan sumber daya APIP. "Nah, itu kan terbatas, kebutuhannya berapa, faktanya berapa. Ini memang harus lintas OPD dengan BKPSDM-nya memenuhi ini sampai optimal," tambahnya.

Selanjutnya adalah terkait beberapa hal yakni integrasi dari aplikasi perencanaan anggaran di Kabupaten Sanggau yang juga sedang berproses, kemudian sertifikasi aset juga sedang berproses. Kemudian, hal-hal yang belum tercapai untuk segera dilak-

sanakan. Misalnya, integrasi aplikasi perencanaan anggaran harus sesegera mungkin ditindaklanjuti. Tri mengatakan salah satu potensi terjadinya korupsi di sektor perencanaan anggaran di APBD jika dokumen perencanaan tidak sesuai dengan penganggaran.

"Dokumen penganggaran tidak sesuai bisa jadi karena tadi, tidak terintegrasi. Jadi masih ada kesempatan untuk manual," terangnya.

Berikutnya adalah terkait sertifikasi aset. "Kita juga harus mengamankan aset-aset pemerintah daerah. Kami yakin semakin lama tidak dilakukan pengamanan kami khawatir aset-aset pemerintah daerah akan hilang. Ini juga yang perlu kita dorong," tuturnya.

Sementara itu, Wabup Yohanes Ontot, berjanji akan terus bergerak. Apa-apa yang menjadi catatan terhad-

dap beberapa OPD dalam pertemuan itu harus diperbaiki.

"Bahwa di semester ini kan sudah oke lah, dari sisi persentase sudah cukup bagus. Harapan kita dengan mereka, karena KPK ini kan belum familiar juga dengan kita. Ya ndak? Kalau mereka

Koordinator tim KPK Tri Budi Rochmanto diwawancarai awak media usai menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkab Sanggau, Rabu (17/7). KINAWA ANBAR

(KPK) datang rasanya mau demam. Kalau yang lain kan, seperti inspektoral, BPK, BPKP kan sudah familiar," ujar Ontot kepada wartawan.

Lebih lanjut, Wabup menilai pertemuan tersebut merupakan awal yang baik. Kran komunikasi dengan lembaga anti rasuah itu pun mulai dibuka untuk mencegah tindak pidana korupsi.

"Ini kan pencegahan, bukan penindakan. Artinya kalau ndak jelas, kita konsultasi dengan dia. Tapi kalau udah penindakan lain masalah. Media juga harus meluruskan ini. Memang KPK adalah mitra kita, untuk meluruskan hal-hal terkait penganggaran dan perencanaan," pungkasnya. **(KIA)**